

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “*Tax Amnesty* dalam perspektif *Fiqh Siyasah Al-Maliyah*” ini di latar belakang oleh Pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur yang sedang direalisasikan dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, yaitu pajak melalui skema *Tax Amnesty*.

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, adapun jenis penelitian yang akan digunakan adalah *library reseach* yang bersifat *analisis deksriftif*. Sumber data primer yang digunakan adalah: 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak; 2) Buku dari Imam Al Mawardi, terj. *AHKAM SULTHANIYAH: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2015. Sumber data sekunder seperti buku dari Zainal Muttaqin. *Tax Amnesty di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2013, kitab-kitab hadits dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian, program *Tax Amnesty* merupakan suatu produk hukum dari kebijakan fiskal negara yang mengatur ketentuan pemasukan dan pengeluaran negara yang tentunya instrumen hukum ini dilaksanakan ketika negara benar-benar sedang membutuhkan dana. Hal ini senada dengan konsep *Fiqh Siyasah al-Maliyah* terdapat kaidah kebijakan fiskal dalam Islam bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Kebijakan *Tax Amnesty* di Indonesia menurut *Fiqh Siyasah al-Maliyah* merupakan hal yang diperbolehkan. Hal ini mengingat bahwa semua dosa selain syirik dapat diampuni. Namun, proses pengampunan tersebut juga diikuti dengan sejumlah tebusan sebagai pengganti dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Selain itu, tebusan disini bukan hanya memiliki tujuan *maslahah* untuk personal saja, tapi juga *maslahah* yang bersifat publik sebagaimana yang tertera pada ketentuan *Fiqh Siyasah al-Maliyah*.

Kata Kunci: *Tax Amnesty, Fiqh Siyasah al-Maliyah, Kebijakan Fiskal*

ABSTRACT

This thesis entitled "Tax Amnesty in Perspective *FiqhSiyasah Al-Maliyah*" as the background of infrastructure development and non-infrastructure realized continuously which aimed at improving people's welfare. One of the efforts for the development is realized by increasing the revenue tax through Tax Amnesty scheme from our country and import materials.

This research used a qualitative research, while the type of research used library research which is a descriptive-analysis. Primary data sources are: 1) 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 about Tax Amnesty; 2) Books from Imam Al Mawardi, terj. AHKAM SULTHANIYAH: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Jakarta: Qisthi Press, 2015. Secondary data sources the books from Zainal Muttaqin. Tax Amnesty di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. 2013, Books of hadith and so on.

Based on the results of this research, the Tax Amnesty program is a legal product of the state fiscal policy that regulates the income and the outcome of the country. and expenditure. This legal instrument is implemented when the country really needed of more income. This concept is equal with the concept of *FiqhSiyasah al-Maliyah* which are the rules of fiscal policy in Islam that any action or a policy of leaders concerning and regarding the rights of the people is associated with the welfare of the people in order to give a good effect. The Amnesty Tax Policy in Indonesia by *FiqhSiyasah al-Maliyah* is permissible. The purpose is to remember that all sins except shirk can be forgiven. However, the process of forgiveness is also followed by a number of responsibility of the mistakes which has made. In addition, the ransom here is not only for the purpose *maslahah* for personal, but also *maslahah* that is public as stated in the provisions of *FiqhSiyasah al-Maliyah*.

Keywords: Tax Amnesty, *FiqhSiyasah al-Maliyah*, Fiscal Policy.